

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Radar Solo

Wilayah: Kabupaten Sragen

Utamakan Pemulihan Ekonomi, Pimpinan DPRD Sragen Kembalikan Mobdin

<https://radarsolo.jawapos.com/daerah/sragen/24/10/2021/utamakan-pemulihan-ekonomi-pimpinan-dprd-sragen-kembalikan-mobdin/>

SRAGEN – Langkah bijaksana dilakukan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen. Mereka memilih mengembalikan mobil dinas guna menghemat anggaran perawatan kendaraan. Sehingga anggaran tersebut bisa dialihkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat.

Saat ini mobil Mitsubishi Pajero Sport AD 2 E yang dipakai ketua dan tiga mobil Toyota Innova Venturer AD 5 E, AD 6 E dan AD 7 E yang digunakan wakil ketua sudah dikembalikan, baik fisik maupun administrasi. Terlebih usia pemakaian kendaraan tersebut sudah lebih dari lima tahun.

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan (Sekwan) Kabupaten Sragen Ari Anggara mengungkapkan, terkait fasilitas sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD. Lebih rinci ditegaskan pada pasal 14-16, pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Sesuai ketentuan, mobil dinas tersebut tidak dapat disewabelikan, digunauahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. Tetapi saat ini mobil dinas pimpinan sudah dikembalikan baik fisik maupun administrasi ke setwan. Karena tidak menggunakan mobil dinas, maka pimpinan berhak mendapatkan tunjangan transportasi.

"Berdasarkan aturan perbup, tunjangan transportasi untuk ketua DPRD jika tidak menggunakan mobdin adalah Rp 15,5 juta perbulan. Sedangkan wakil ketua Rp 11,7 juta dan anggota Rp 10,5 juta," terangnya.

Sesuai ketentuan tunjangan tersebut masih harus dipotong pajak 15 persen. Kebijakan tersebut bisa menghemat pengeluaran untuk perawatan mobil dinas. Karena sejauh ini kendaraan mobil dinas yang sudah dikembalikan sering mengalami masalah.

Ketua DPRD Sragen Suparno menyampaikan pihaknya mengembalikan mobil dinas ke aset daerah. Langkah tersebut menghemat anggaran pemerintah untuk biaya perawatan. Dia meminta biaya perawatan digunakan sebaik-baiknya oleh pihak eksekutif untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Apalagi postur APBD Kabupaten Sragen saat ini sangat minim. Secara umum anggaran untuk pemberdayaan ke masyarakat hanya sekitar Rp 47,5 miliar. Sehingga biaya perawatan bisa dimaksimalkan ke sektor tersebut. Terlebih lagi pihaknya tidak mengajukan kendaraan baru.

"Saya tidak meminta kendaraan yang baru. Saya memilih uang yang bakal digunakan untuk membeli kendaraan dinas agar dikembalikan ke masyarakat. Digunakan untuk pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19," ujarnya.

Langkah tersebut juga dilakukan oleh para wakil ketua DPRD Sragen. Sehingga empat mobil dinas dikembalikan ke sekretariat dewan. Mobil dinas sebelumnya juga sempat mogok di jalan tol saat perjalanan kegiatan dinas ke Semarang. Namun sudah diperbaiki sebelum dikembalikan ke aset daerah.

Sementara untuk menunjang aktivitasnya, mereka menggunakan mobil pribadi dan mobil operasional rumah dinas. Dengan demikian biaya perawatan mobil dinas bisa dihemat dan tidak dianggarkan.

"Pemeliharaan tidak dianggarkan. Hanya dibiayai pemerintah ketika sedang ada kegiatan saja," ujarnya.

Suparno memastikan pengembalian mobil tidak hanya dokumen saja. Namun juga fisiknya. Politisi PDI Perjuangan ini lebih memilih mobil toyota Camry yang dibeli pada 2011 lalu. Mobil tersebut merupakan bekas operasional ketua DPRD sebelumnya.

"Kondisinya sebelumnya tak terawat. Ini statusnya pinjam pakai, soal operasional jadi tanggung jawab saya secara pribadi. Perbaiki kondisi kendaraan juga menggunakan biaya pribadi," ujarnya. **(din/adi/dam)**

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH